

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Sektor pariwisata di Indonesia termasuk sebagai penyumbang terbesar devisa bilamana dikaitkan dengan sektor ekonomi. Selain itu, sector ini juga melibatkan pelaku ekonomi kecil sehingga geliat pariwisata di daerah secara signifikan berdampak pada perekonomian rakyat. Sejak tahun 2004 pariwisata menempati peringkat ke-2 sebagai penyumbang devisa terbesar setelah migas, dan pada 2007 menempati posisi ke-3 dengan menyumbang kurang lebih 5,3 juta US dollar, ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang dapat diandalkan di tengah keterbatasan sumber-daya minyak dan gas. (WTTC,2011)

Penggarapan pariwisata tidak lepas dari kesiapan daerah dalam membangun infrastruktur kepariwisataan. Ini merupakan sebuah konsekwensi ketika yang diharapkan adalah kunjungan wisatawan. Para wisatawan menghendaki pemerintah melakukan tata kelola atas sumber daya kepariwisataan secara baik dan pengelola dimaksud tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah mengingat objek daya tarik wisata itu berada dan dimiliki oleh daerah.

Dalam laporan *Travel & Tourism Competitiveness Index 2009*, Indonesia menempati posisi 80 pada diantara 133 negara, dibawah Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia dan Singapore. Dari semua faktor yang mempengaruhi posisi tawar destinasi Indonesia, indicator penarik kedatangan turis manca di Indonesia belum bersifat akumulatif. Salah satunya adalah buruknya system perencanaan dalam pengembangan destinasi wisata. Perencanaan pariwisata yang dilakukan oleh

Dinas Kepariwisata di Indonesia belum memperhitungkan kenyamanan objek tetapi lebih berorientasi pada penyelenggaraan event sehingga aspek kenyamanan yang menjadi faktor penarik kedatangan turis tidak bersifat akumulatif. Infrastruktur menuju destinasi, ketersediaan hotel yang tidak nyaman, budaya turis yang dianggap sebagai pembawa masalah sosial, razia petugas pada hotel-hotel dan sebagainya menjadikan daya tarik objek wisata di Indonesia menjadi rendah. (UNWTO, 2010)

Destinasi pariwisata merupakan unsur vital sekaligus penggerak utama bagi wisatawan dalam memutuskan perjalanan dan kunjungan ke suatu daerah, Untuk itu perencanaan tampaknya perlu dilakukan terutama dalam upaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan motivasi wisatawan serta tetap mempunyai kaitan dengan rencana strategis pariwisata dalam lingkup negara. Pembangunan pariwisata di Indonesia dalam renstra Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Nasional menegaskan beberapa poin penting yang hendak dicapai dalam pembangunan pariwisata, antara lain adalah: terwujudnya pariwisata nusantara, pemerataan dan keseimbangan pengembangan destinasi, kontribusi dalam perekonomian nasional, adanya keunggulan kompetitif dari produk wisata, dan pelestarian lingkungan hidup.

Secara umum dalam pengembangan pariwisata khususnya destinasi pariwisata memang terdapat kesenjangan antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur, termasuklah Kabupaten Natuna yang masuk dalam Indonesia Barat. Terdapat dua skenario menurut Cetak Biru Pengembangan Destinasi di Indonesia, yaitu peningkatan daya saing khususnya wilayah bagian Barat Indonesia,

dan penyebaran pertumbuhan khususnya untuk wilayah Kepulauan Riau termasuk skenario penyebaran pertumbuhan dengan fokus pada perintisan, pembangunan dan revitalisasi dengan beberapa tema pengembangan antara lain adalah: tema bahari, ekowisata, budaya, belanja, ziarah, dan product unggulan lokal.

Suatu daerah ketika telah menempatkan dirinya, memperkaya dan mengidentifikasi segala sumber atraksi dengan dilakukannya pembangunan akomodasi, fasilitas, dan kemudahan akses serta transportasi dan berpotensi untuk menjadi daerah tujuan wisata, maka selanjutnya mengadakan, menarik pengunjung atau wisatawan untuk datang. Akan tetapi wisatawan tidak begitu saja datang, potensi pasar dengan karakteristiknya perlu dipelajari dan dianalisa, sehingga didapat kebutuhan dan proyeksi motivasi serta keinginan dari sumber wisatawan untuk mengunjungi sebuah daerah tujuan wisata. Bentuk, harga, dan karakter dari pengunjung merupakan beberapa alasan untuk berpergian. (Ritchie dkk, 2003)

Esensi dari pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan adalah strategi merencanakan dan memanfaatkan potensi dan keunggulan lokal bagi kesejahteraan rakyat dengan tidak merusak keunggulan wilayah (Tribe, 2011). UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata telah memuat filosofi bahwa pariwisata diselenggarakan untuk mensejahterakan masyarakat melalui penyelenggaraan hiburan yang disinergikan dengan bisnis agar pemerintahan daerah memperoleh tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD); sementara masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata juga dapat menikmati keuntungan secara materi dari mengelola bisnis yang terkait dengan industri pariwisata. Untuk mencapai tujuan itu, maka Undang-Undang memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk

mengatur pembangunan dan pengelolaannya melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan kepariwisataan daerah dan juga melengkapi aturan yang telah ada sebelumnya.

Ketika sumber daya kepariwisataan itu dapat dikelola dan dinikmati oleh banyak orang; keindahan itu tidak akan pernah habis. Ketika itu yang terjadi, sebuah destinasi akan ramai dikunjungi orang dan dengan serta merta akan mendatangkan manfaat ekonomis bagi destinasi (Ryan, 2003). Berbagai potensi yang dapat dikembangkan menjadi paket wisata diantaranya keunggulan letak geografis, keaneka-ragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, barang peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya (Holloway, 2009) yang kesemuanya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia pada umumnya untuk dikelola secara profesional bagi mewujudkan *Wonderful Indonesia*. Jauh lebih penting dari itu semua adalah kemampuan seluruh stakeholder kepariwisataan di daerah destinasi untuk mengemas berbagai potensi itu ke dalam paket wisata (Erdi, 2015).

Keberadaan sumber daya tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal, efektif dan efisien melalui kepariwisataan guna mendorong pendapatan melalui perolehan devisa negara, meningkatkan pembangunan yang merata, menambah lapangan pekerjaan masyarakat, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan potensi wisata di destinasi (Matias, dkk 2011) serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa (Jeffreis, 2001).

Model yang ingin dicapai dalam pengembangan pariwisata di daerah adalah model interaktif, dimana proses pengembangan sektor pariwisata membutuhkan kebijakan pemerintah daerah yang dijabarkan secara jelas melalui program pengembangan destinasi dengan melibatkan berbagai stakeholder. Ketika pariwisata dikembangkan tanpa komitmen penuh dari pemerintah, maka destinasi itu akan menjadi suram dan demikian juga sebaliknya. Pengembangan pariwisata adalah tugas lintas sektor yang memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak, tidak hanya industri pariwisata atau institusi tertentu. Dibutuhkan usaha yang lebih massif untuk memastikan semua pihak mengetahui peran masing-masing agar dapat secara aktif berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Dialog antara pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan keberlangsungan destinasi berikut seluruh komponen ikutannya.

B. Rumusan Masalah

Natuna merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah kepulauan yang berada paling utara di Selat Karimata dan berbatasan laut (*maritime*) langsung dengan Vietnam dan Kamboja, Singapura dan Malaysia. Selama ini, Natuna hanya dikenal sebagai jalur pelayaran strategis internasional, sebagai tempat singgah kapal, dikenal sebagai penghasil minyak dan gas terbesar di Kepulauan Riau serta tempat eksploitasi ikan.

Sebenarnya, Kepulauan Natuna tidak hanya saja menyimpan hasil bumi yang melimpah tetapi juga memiliki banyak tempat keren dan indah yang dapat dijadikan daerah kunjungan wisata. Pesona pantai, laut, karang dan pulau-pulainya

belum menggaet wisatawan dari luar daerah hingga kini; berbagai potensi kepariwisataan maritime ini tidak terekspos menjadi daya tarik wisata. Riset ini mencoba untuk memaparkan berbagai keunggulan wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Natuna berikut strategi perencanaan inewujudkan Kepulauan Natuna sebagai destinasi wisata bertaraf Internasional.

Oleh karena itu, masalah dalam penelitian ini adalah “belum terakomodirnya unsur-unsur pembentuk kekuatan daerah dalam perencanaan kepariwisataan di Kabupaten Natuna sehingga menyebabkan potensi wisata maritim tidak dapat berkembang secara akumulatif dan proporsional”. Dasar peneliti melihat masalah ini paling tidak dari empat aspek sebagai berikut:

1. Pertumbuhan wisatawan manca tidak berkembang secara proporsional disebabkan perencanaan pengembangan objek dan daya tarik wisata tidak mengakomodir kekuatan pembentuk destinasi sehingga potensi itu tidak dapat digarap secara professional dan berkelanjutan. Jumlah wisatawan manca tahun 2012 berjumlah 267 orang, tahun 2013 berjumlah 294 orang, tahun 2014 berjumlah 323 orang dan tahun 2015 berjumlah 340. Terjadinya peningkatan kunjungan wisatawan ini setelah Pemda melakukan event tahunan diantaranya Funtouristic Festival, Festival Wisata Bahari, Atraksi Seni Budaya, Sail To Natuna (Kedatangan kapal Yacht) dan lain-lain.
2. Pembangunan infrastruktur kepariwisataan masih sangat terbatas karena tidak memiliki koneksi perencanaan yang melibatkan SKPD lain sehingga focus pengembangan dimaksud seakan tidak mendapat perhatian pemerintah daerah. Hingga kini, belum ada objek yang dibangun swasta. Ketika membaca Renstra

Daerah, pada program pengembangan destinasi hanya ditemui sebanyak 9 destinasi dengan dana yang direncanakan tidak lebih dari Rp 20 M. Dari data Renstra ini, pengembangan kepariwisataan di Natuna akan berjalan lambat dan bahkan akan disalib oleh Kabupaten Anambas yang merupakan kabupaten pengembangan Natuna.

3. Perencanaan untuk pelibatan masyarakat dalam tata kelola kepariwisataan belum dilakukan pemerintah sehingga promosi perjalanan lebih bertumpu pada agen perjalanan wisata dengan biaya mahal dan terbatas agar event kepariwisataan daerah yang berjumlah 11 event terkoneksi ke dalam system kepariwisataan nasional.

Kepulauan Natuna telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tetapi tidak menjadi 10 lokasi prioritas pengembangan destinasi untuk membentuk bali baru; sehingga membutuhkan perencanaan yang strategis dalam system kepariwisataan nasional.

Sehubungan dengan Identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah adalah:

1. Mengapa pemerintah daerah Kabupaten Natuna tidak melakukan perencanaan kepariwisataan sesuai dengan UU no 10 tahun 2009 agar dapat mengundng peran banyak pihak termasuk aktor pusat dalam pengembangan distnasi Kabupaten Natuna?
2. Bagaimana semestinya koordinasi perencanaan antara dinas pariwisata dengan dinas teknis lainnya terutama dinas Pekerjaan Umum dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kepariwisataan daerah?

3. Bagaimana semestinya strategi pemerintah Daerah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam industri pariwisata daerah agar terintegrasi dalam Sistem Kepariwisata Nasional ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis reabilitas unsur-unsur perencanaan pariwisata berdasarkan keunggulan komparatif daerah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis keempat hal sebagaimana tersebut dalam perumusan masalah, yakni:

1. Memahami dan menganalisis aspek perencanaan kepariwisataan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna sesuai dengan UU NO 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan agar dapat mengundang peran banyak pihak dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Natuna.
2. Memahami dan menganalisis tentang koordinasi dan koneksi perencanaan antara dinas pariwisata dengan SKPD lainnya terutama dinas Pekerjaan Umum dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kepariwisataan Daerah.
3. Memahami dan menganalisis strategi pemerintah Daerah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam industri pariwisata daerah agar terintegrasi dalam Sistem Kepariwisata Nasional.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini; yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut didetilkkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis,

1.1 Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perencanaan dengan lokus pada pengembangan destinasi wisata mengikuti konsep KSPN.

1.2 Bisa dijadikan bahan rujukan oleh peneliti berikutnya.

2. Manfaat praktis; yakni manfaat yang dapat langsung dimanfaatkan oleh para pihak; yang dalam hal ini adalah stakeholder kepariwisataan, diantaranya:

- a. Tersusunnya konsep perencanaan strategis untuk pengembangan destinasi berbasis keunggulan kompetitif daerah yang dapat saja diadopsi sebagai konsep rencana strategis daerah (renstrada) melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna.
- b. Terbukanya pemikiran pemerintah Daerah untuk memberikan peluang investasi pada kawasan-kawasan strategis kepariwisataan agar dapat menata daerah secara profesional.
- c. Tersusunnya konsep melibatkan masyarakat dan pengusaha dalam pengembangan destinasi wisata di kawasan wisata

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Kepariwisata

Pada dasarnya wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di luar tempat tinggalnya, bersifat sementara untuk berbagai tujuan yang tidak untuk mencari nafkah (Hall, 2018). Kegiatan berwisata merupakan hak asasi seseorang yang perlu dihargai sebagaimana dinyatakan dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang melakukan kegiatan wisata diperlukan serangkaian upaya yang saling terkait dan terpadu oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan perpaduan ini, terbentuklah *good tourism governance* (Croley, 2008).

Hakekat pariwisata Indonesia bertumpu pada keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta hubungan antar manusia. Melalui pengembangan pariwisata diharapkan dapat memperkuat jati diri bangsa dan lestari lingkungan. Namun demikian pengembangan kepariwisataan Indonesia tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, muncul kemudian istilah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang membutuhkan konsep perencanaan secara integral dengan tidak hanya bagus dalam aspek perencanaan tetapi juga terukur dalam implementasinya di lapangan.

Pembangunan kepariwisataan Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan bertujuan untuk

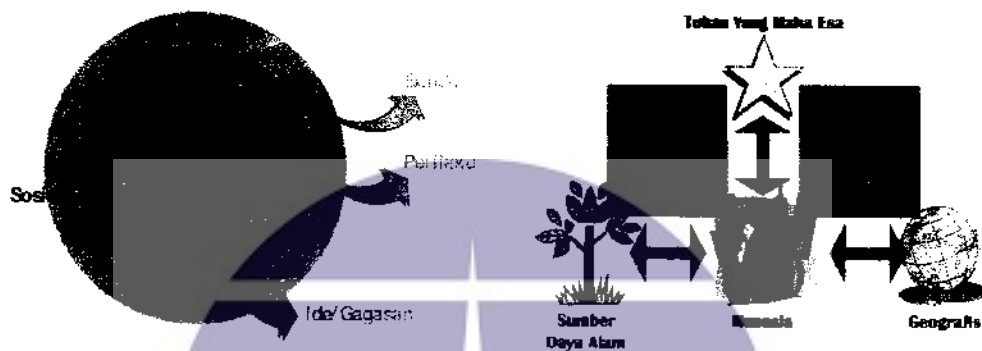
turut mewujudkan peningkatan kemampuan manusia dan masyarakat Indonesia berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Oleh karena itu, pariwisata nasional dikembangkan sebagai salah satu alternatif dalam pembangunan ekonomi melalui berbagai macam pendekatan dan cara. Indonesia mengembangkan kepariwisataannya melalui suatu konsepsi pengembangan yang bertumpu pada asas kehidupan yang berkeselimbangan dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan suatu konsepsi yang menjadi landasan dalam pengembangan kepariwisataan nasional.

Konsepsi tersebut meliputi falsafah pengembangan kepariwisataan nasional, sistem kepariwisataan nasional dan sistem pariwisata nasional.

1. Falsafah Pengembangan Kepariwisata Nasional

Pengembangan kepariwisataan Indonesia tetap menjunjung ciri khas bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pancasila, UUD 1945, GBHN dan Ketetapan MPR mengenai kesatuan dan persatuan bangsa serta etika berbangsa dan bernegara. Pada intinya pengembangan kepariwisataan Indonesia selalu merujuk pada norma-norma agama dan nilai-nilai budaya dalam setiap aspeknya yang kemudian diwujudkan ke dalam produk kepariwisataan nasional. Dengan demikian, norma-norma dan nilai-nilai dasar tersebut selalu mewarnai perilaku pengembangan kepariwisataan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan (lihat Gambar 2.1) yang kemudian berevolusi bersinergi membentuk filosofi pariwisata Indonesia (lihat Gambar 2.2). Hal ini sekaligus merupakan keunggulan komparatif pengembangan

kepariwisataan di Indonesia dengan memadukan berbagai unsur (alam, manusia dan geografis) dengan tidak pernah melepaskannya dengan Tuhan.



Gambar 2.1 Aspek Kehidupan Pariwisata Dalam Kebudayaan Nasional

Gambar 2.2 Landasan Filosofis Pengembangan Pariwisata Indonesia

Kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan aset penting dalam pengembangan pariwisata, di mana pariwisata sebagai alat pelestari kebudayaan, dapat berperan secara aktif memperkenalkan hasil-hasil budaya Indonesia. Falsafah pengembangan kepariwisataan nasional dilandasi oleh konsep hidup bangsa Indonesia yang berkeselimbangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa lingkungan sumber daya alam maupun lingkungan geografis.

Semua agama yang diakui di Indonesia pada dasarnya mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan yang berkeselimbangan. Islam mengenal prinsip *hablumminallah wa hablumminannas*; Nasrani mengajarkan *hukum kasih*; Buddha mengajarkan *mangalasutta*; Hindu dengan *tri hita karana*; dan Khonghucu mengajarkan *tiar oi ren'thian the jen*. Demikian pula dengan nilai-nilai budaya

yang berkembang di Indonesia, selalu menggambarkan rasa syukur manusia kepada Tuhan yang Maha Esa. Konsep hubungan kehidupan manusia yang berkeselimbangan (*balance of life*) dapat dikemas menjadi sebuah paket wisata sehingga dapat terus dikembangkan sedemikian rupa tidak akan pernah saling berbenturan. Konsep ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hubungan Secara Vertikal Manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa

Segala usaha dan kegiatan pengembangan kepariwisataan hendaknya digerakkan dan dikendalikan oleh keinnanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spritual, moral dan etika. Dengan demikian segala bentuk kegiatan yang bertentangan deng nilai-nilai tersebut di atas, seperti perjudian, narkoba dan perbuatan yang melanggar kesusilaan, tidak dapat ditolerir dan bukan merupakan bagian dari pengembangan pariwisata Indonesia. Beberapa pemerintah daerah kemudian melakukan isolasi antara kawasan pemukiman dengan kawasan wisata sebagaimana terjadi di Lombok melalui Pantai Sanggigi. Pada kawasan itu, masyarakat tidak boleh protes atas aktivitas kepariwisataan yang dilakukan para turis sepanjang norma-norma umum tidak dilanggar.

b. Hubungan Manusia dengan Sesama

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri oleh karena itu ia harus berinteraksi dengan sesama, baik dalam lingkup keluarga maupun lingkungan masyarakat. Interaksi yang dijalin tetap mengedepankan toleransi dan rasa saling mengasihi, menjunjung tinggi asas keadilan dan kesetaraan. Dalam pengembangan

pariwisata hendaknya tetap mengacu pada prinsip-prinsip di atas yang merupakan ciri khas dari kehidupan masyarakat Indonesia.

c. Hubungan Manusia dengan Lingkungan

Manusia hidup di tengah-tengah lingkungan alam dan mendapatkan kehidupannya dengan memanfaatkan alam, sehingga dalam rangka menjaga kesinambungan kehidupannya ia wajib memelihara dan melestarikan alam. Pengembangan pariwisata di Indonesia memanfaatkan lingkungan, baik berupa sumber daya alam maupun kondisi geografis, dengan menerapkan keseimbangan hubungan mikro (manusia) dan makro (alam) kosmos untuk mencegah ketidakadilan, keserakaban dan pengrusakan terhadap budaya dan alam.

Tiga konsep kehidupan yang berkeimbangan tersebut di atas mengajarkan manusia untuk tidak menjadi rakus dan selalu mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian. Konsep dimaksud sesungguhnya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu dengan berbagai keunikan konsep pemikiran yang dihasilkan dan dalam masyarakat sendiri tanpa campur tangan pihak luar (*local genius/local wisdom*). Filosofi dan hakekat pembangunan kepariwisataan Nasional yang menonjolkan prinsip-prinsip keseimbangan ini, di dalam operasionalisasinya menekankan pada aspek keseimbangan antara unsur pemanfaatan sumber daya dan konservasi, di mana hal ini merupakan jiwa yang dianut dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Di samping itu peran serta dan keterlibatan masyarakat

dalam pengembangan kepariwisataan juga merupakan faktor penentu yang secara nyata diwujudkan melalui partisipasi masyarakat.

Kepariwisata nasional adalah pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pelibatan masyarakat secara aktif merupakan salah satu landasan penting keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan kepariwisataan akan berhasil bila tiga pihak saling bersinergi dan serasi menjadikan tersebut yang telah memiliki keunikan dan kekhasan sebagai modal dasar untuk mengembangkan pariwisata daerah dalam kerangka kepariwisataan nasional melalui peningkatan daya saing daerah.

Banyak daerah memiliki keunggulan kompetitif dan ketika ketiga pihak tidak mampu melakukan sinergi yang saling mendukung dalam memberikan layanan terbaik bagi wisatawan, maka destinasi ini akan tidak berkembang dan hanya menjadi sebuah bahan cerita yang tidak mendatangkan apa-apa. Salah satu unsur perjalanan wisatawan ke suatu destinasi adalah untuk melihat sesuatu yang unik yang belum pernah dilihat atau dirasakan. Dengan demikian destinasi yang dapat mempertahankan keunikan, kekhasan serta kelokalan dan keaslian daerahnya akan menjadi penentu pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di daerah tersebut.

2. Sistem Kepariwisataan

Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan idil (Nilai-nilai Agama dan Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD 1945, Garis-Garis Besar Haluan dan UU No. 9 Tahun 1990) yang secara operasional dilaksanakan

oleh para pelaku utama pengembangan kepariwisataan. Para pelaku utama tersebut menggerakkan kegiatan pariwisata yang bertumpu pada pergerakan aspek-aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang secara dinamis mendukung kepariwisataan nasional.

Pelaku utama yang menggerakkan roda pembangunan pariwisata adalah unsur dari dunia usaha, masyarakat (termasuk pers, LSM, akademisi) dan pemerintah. Namun demikian, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator, sedangkan usaha pariwisata dan masyarakat merupakan pelaku-pelaku langsung dalam kegiatan kepariwisataan. Kepariwisata Nasional yang dilaksanakan dalam konsepsi tersebut di atas bersifat multi dimensi, interdisipliner dan partisipatoris dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu.

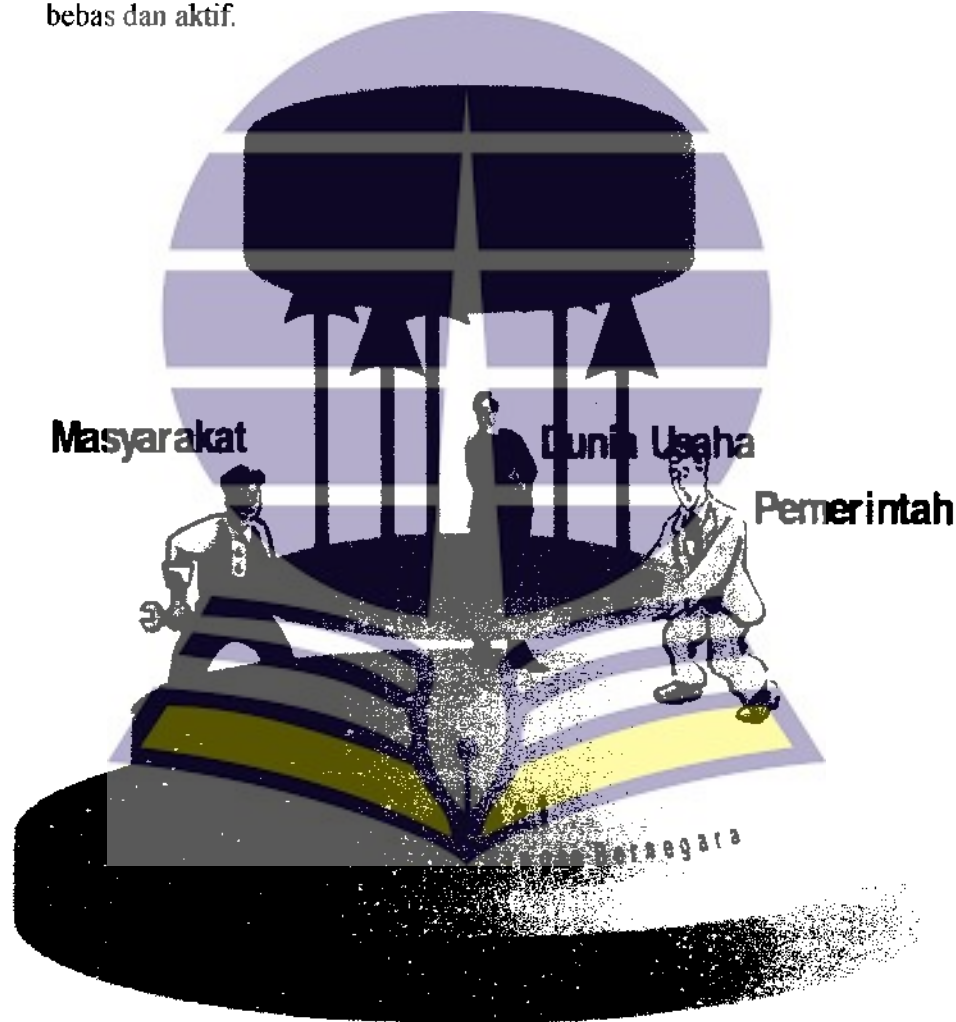
Melalui pembangunan pariwisata yang dilakukan secara komprehensif dan integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan kondisi geografis Indonesia secara arif, maka akan tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada akhirnya akan menciptakan ketahanan nasional yang tangguh (lihat Gambar 2.3 tentang Sistem Kepariwisata Nasional).

Dari gambar tersebut terlihat bahwa kondisi yang diharapkan dari aspek-aspek yang memberikan pengaruh dan sekaligus dipengaruhi oleh pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Ketahanan Ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan

nasional) dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

- b. Ketahanan Politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.



Gambar 2.3 Sistem Kepariwisata Nasional

- c. Ketahanan Ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
- d. Ketahanan Sosial Budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
- e. Ketahanan Pertahanan Keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas keamanan, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Kelima unsur dalam system kepariwisataan nasional di atas merupakan unsur dasar yang akan membentuk kekuatan rakyat untuk tidak terpengaruh pada berbagai norma, nilai dan budaya yang dapat saja dibawa oleh wisatawan saat berkunjung ke destinasi. Dengan kekuatan lima unsure di atas, justru akan tampil karakteristik khusus yang dapat mencirikan Indonesia dalam pengembangan pariwisata. Kondisi ini akan tidak terjadi dengan sendirinya dan membutuhkan perencanaan yang kokoh sebagai dasar bagi para pihak untuk membangun

pariwisata dengan tetap bersendikan pada khasanah budaya, moral dan nilai bangsa Indonesia.

3. Sistem Pariwisata

Sistem Pariwisata menurut Jordan (dalam Leiper, 2004:48) adalah tatanan komponen dalam industri pariwisata dimana masing-masing komponen saling berhubungan dan membentuk sesuatu yang bersifat menyeluruh. Leiper (2004) mencoba menjelaskan sistem pariwisata secara menyeluruh (*whole tourism system*) dimulai dengan mendeskripsikan perjalanan seorang wisatawan hingga ke destinasi dan kembali ke negara asalnya lagi. Dari hasil analisisnya ia mencatat sebanyak 5 elemen pokok sebagai subsistem dalam setiap sistem pariwisata yang menyeluruh itu, yaitu:

- a. Wisatawan (*tourist*) yang merupakan elemen paling pokok yaitu orang yang melakukan perjalanan wisata.
- b. Daerah asal wisatawan (*traveller-generating regions*), merupakan elemen geografi yaitu tempat dimana wisatawan mengawali dan mengakhiri perjalanannya.
- c. Jalur pengangkutan (*transit route*) merupakan elemen mobilitas penghubung destinasi yang membawa wisatawan sampai ke destinasi dan kembali ke daerah asal.
- d. Daerah tujuan wisata (*tourist destination region*) sebagai element geografi yaitu tempat utama yang dikunjungi wisatawan.

- e. Industri pariwisata (*tourist industry*) sebagai elemen organisasi, yaitu kumpulan dari organisasi yang bergerak dalam usaha pariwisata, bekerjasama dalam pemasaran pariwisata untuk menyediakan barang, jasa dan fasilitas; mulai dari perjalanan hingga tiba di destinasi wisata.

Pariwisata merupakan fenomena yang multidimensional dan multisektoral yang membentuk satu kesatuan sistem. Sistem kepariwisataan yang sederhana meliputi:

- a) Melihat pariwisata dari sisi penawaran dan permintaan;
- b) Mempunyai hubungan ketergantungan atau keterkaitan antara destinasi dan sumber pasar yang dihubungkan dengan transportasi;
- c) Didasari oleh arus informasi yang dapat mendorong dan memungkinkan wisatawan datang.
- d) Sistem yang lain melihat keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain antara berbagai komponen kepariwisataan, yang tak dapat dipisah-pisahkan sebagai satu kesatuan produk: transportasi yang menyediakan akses, daya tarik yang menjadi faktor utama kunjungan, *amenities* yang disiapkan untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan.
- e) Dilihat dalam hubungan input-output, sistem ini berada dalam lingkungan yang lebih luas, output-nya akan tergantung bukan hanya kepada input tetapi kepada bekerjanya faktor-faktor strategis lingkungan dan instrumen-instrumen kelembagaan.

Ada tiga subsistem yang membentuk keseluruhan pariwisata. Pertama, Sub-sistem industri pariwisata yang menggambarkan hubungan antara penawaran

dengan permintaan dalam sistem kepariwisataan. Kedua, subsistem destinasi yang menggambarkan kesaling terkaitan antar komponen destinasi. Ketiga, subsistem kelembagaan yang menggambarkan hubungan antara lembaga-lembaga masyarakat, industri, dan pemerintah yang diperlukan agar pariwisata berkembang dengan memberi manfaat bagi semua pihak secara berimbang.

Pariwisata merupakan sektor yang multidimensional karena memiliki keterkaitan dengan banyak sektor dan ilmu, karenanya membutuhkan pemahaman yang tepat agar dapat mengelola unsur-unsur pariwisata secara utuh termasuk stakeholders yang terlibat dan terkait didalamnya. Pariwisata memiliki suatu sistem dan rangkaian mata rantai yang sangat kuat sehingga dinamakan Anatomi Pariwisata atau bagian dari batang tubuh pariwisata. Pada dasarnya struktur anatomi pariwisata tidak terlepas dari pemahaman dan ruang lingkup terhadap pariwisata internasional, nasional, dan regional. Oleh karena itu, seluruh stakeholder dapat berperan dalam system itu mengikuti kapasitas, kewenangan dan posisi dari masing-masing pihak.

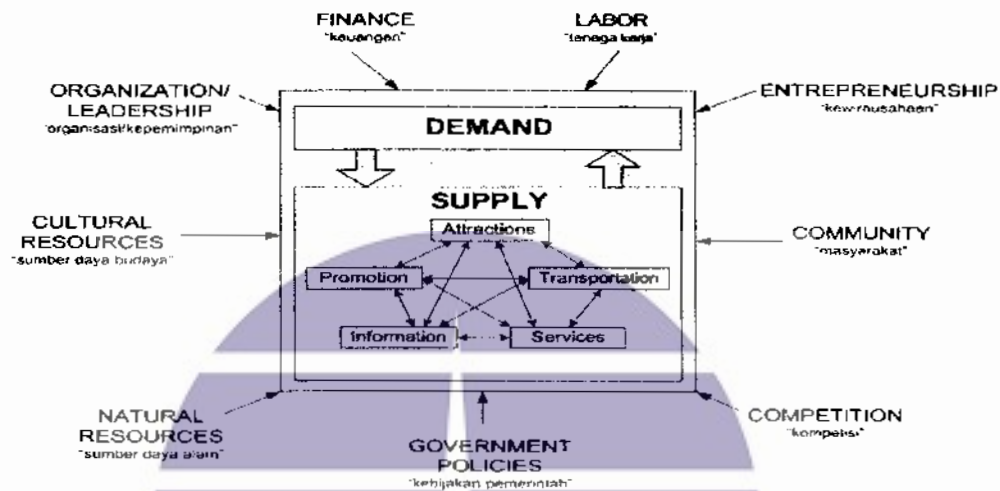
Pariwisata internasional berpengaruh terhadap kondisi pariwisata nasional dan daerah. Hal ini karena berhubungan dengan adanya beberapa interaksi, diantara wisatawan dan masyarakat di tingkat destinasi. Interaksi pemahaman dan pandangan berpikir diantara wisatawan dan masyarakat, serta interaksi usaha pariwisata yang ditimbulkan karena adanya kegiatan wisata.

Pemikiran tentang kepariwisataan sebagai sebuah sistem mulai berkembang pada tahun 1964, ketika Wolfe mengembangkan *outdoor recreation system* dan mengemukakan bahwa pariwisata lebih dari sekedar industri tetapi sebuah sistem

yang terdiri dari komponen-komponen utama yang saling terkait dalam hubungan yang erat dan saling mempengaruhi (Gunn dan Turgut, 1994). Penelitian-penelitian tentang sistem kepariwisataan berkembang dengan pesat pada tahun 1970 – 1980-an, serta sebagian besar membahas tentang dasar teori dan konteks sistem kepariwisataan dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan (Scarpino 2009). Atas dasar itu, berikut ini akan dijelaskan pariwisata sebagai sebuah system.

Model sistem kepariwisataan sebagai dasar teori antara lain dibahas oleh Gunn dan Turgut (1972). Model sistem kepariwisataan Gunn lebih sarat dengan aspek-aspek ekonomi, yang mengemukakan keterkaitan antara sisi sediaan (*supply*) dengan permintaan (*demand*) serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya. Gunn berpendapat bahwa untuk memuaskan permintaan pasar, sebuah negara, wilayah, atau masyarakat harus menyediakan beragam pembangunan dan pelayanan (sisi sediaan). Kesesuaian antara sisi sediaan dengan sisi permintaan adalah kunci keberhasilan dalam pengembangan kepariwisataan yang benar (Gunn dan Turgut 2002). Lebih lanjut ia kemudian menjelaskan bahwa keberhasilan sistem kepariwisataan dipengaruhi juga oleh faktor-faktor eksternal. Beberapa faktor dapat memberikan pengaruh besar dalam mengembangkan kepariwisataan. Ia mengidentifikasi sembilan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sistem kepariwisataan, yaitu sumber daya alam, sumber daya budaya, organisasi/kepemimpinan, keuangan, tenaga kerja, kewirausahaan, masyarakat, kompetisi, dan kebijakan pemerintah. Model sistem kepariwisataan Gunn dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.4.
Sistem kepariwisataan dari dimensi ekonomi



Sumber: Model Sistem Kepariwisataann Gunn 2002

Berbeda dengan Gunn, Leiper (dalam Getz 1986) memandang sistem kepariwisataan dari dimensi spasial. Gunn mengungkapkan bahwa sistem kepariwisataan merupakan hubungan yang saling ketergantungan antara daerah penbangkit wisatawan dengan destinasi pariwisata. Model Leiper mengidentifikasi lima komponen dalam sistem kepariwisataan, yaitu wisatawan, daerah tempat tinggal wisatawan, jalur transit, destinasi pariwisata, dan industri pariwisata. Leiper juga mengemukakan bahwa pariwisata terjadi jika satu saja dari komponen-komponen tersebut ada dalam suatu proses yang saling terkait. Sistem kepariwisataan Leiper tidak jauh berbeda dengan Gunn, bedanya hanya pada titik tekan pengorganisasian yang membutuhkan keseimbangan diantara kelima unsurnya itu.

Model sistem kepariwisataan yang mengaitkannya dengan konteks proses perencanaan/pengelolaan pariwisata dikemukakan antara lain oleh Mill & Morrison (1985), yang kemudian dikembangkan pada tahun 1992, serta Cornellisen (2005). Mill & Morrison mengungkapkan empat komponen pembentuk sistem kepariwisataan, yaitu *market* (pasar), *marketing* (pemasaran), *destination* (destinasi/daerah tujuan wisata), dan *travel* (perjalanan).

- 1) *Market* (pasar): mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pasar dengan penekanan pada perilaku pasar, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perjalanan wisata, dan proses pengambilan keputusan berwisata.
- 2) *Marketing* (pemasaran): menfokuskan pada strategi bagaimana pengelola pariwisata merencanakan, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada wisatawan.
- 3) *Travel* (perjalanan): fokus pada pergerakan wisatawan, moda transportasi, dan segmen pasar.
- 4) *Destination* (destinasi/daerah tujuan wisata): mencakup proses dan prosedur yang dilakukan oleh destinasi pariwisata dalam pembangunan dan mempertahankan keberlanjutan kepariwisataan.

Pada awalnya, model sistem kepariwisataan yang dikembangkan oleh Mill & Morrison merupakan model linier dari Gunn, yang menjelaskan hubungan linier antara komponen-komponen di dalamnya.

Model Mill & Morrison menjelaskan bahwa pemasaran menjual destinasi kepada pasar/wisatawan, sementara *travel* mengantarkan pasar ke destinasi

pariwisata. Seluruh komponen tersebut harus dipahami, direncanakan, dan dikelola dengan baik sehingga dapat membangun sistem kepariwisataan yang positif dan memberikan manfaat yang optimal bagi destinasi dan masyarakatnya.

Model sistem kepariwisataan lain yang terkait dengan proses perencanaan/pengelolaan dikembangkan juga oleh Cornelissen pada tahun 2005 yang merupakan pengembangan dari pemikiran Britton (1991) tentang sistem produk pariwisata. Cornelissen menamakan modelnya sebagai *The Global Tourism System* (Cornelissen 2005). Pada model ini, sebagaimana diungkapkan oleh Cornelissen bahwa pariwisata global memerlukan pasar yang berbeda atau khusus didasarkan pada pertukaran antara produsen dan konsumen pariwisata. Pada sisi permintaan (*demand*), hal tersebut terdiri dari kelompok-kelompok sosial dengan karakteristik sosial ekonomi dan sosial budaya, minat, kebutuhan, dan keinginan tertentu. Pada sisi sediaan (*supply*) terdiri dari produsen-produsen yang berinteraksi, inovasi, dan bersaing. Keterkaitan antara produsen dimonitor dan diatur oleh lembaga-lembaga yang mengatur perkembangan/berjalannya pariwisata (Cornelissen 2005) yang dalam hal ini adalah regulasi atau kebijakan pemerintah.

Model sistem kepariwisataan yang dikemukakan oleh Cornelissen ini pada dasarnya melihat kepariwisataan dari dua sisi yang sama dengan yang dikemukakan oleh Gunn dan Turgut (1972), yaitu sediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*), tetapi dengan tambahan komponen lembaga-lembaga pengatur sebagai komponen control, yang dalam hal ini dapat diperankan oleh pemerintah atau pihak pemilik otoritas.

Keempat sistem kepariwisataan tersebut pada prinsipnya mencakup dua komponen utama, yaitu permintaan (*pasar*) dan sediaan (*supply*). Komponen sediaan terdiri dari daya tarik wisata, akomodasi, transportasi (produsen dan produknya) yang diwadahi di destinasi pariwisata. Komponen permintaan terdiri dari keinginan, kebutuhan, dan persepsi wisatawan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis, psikografis, ekonomi, dan sosial. Seperti sistem kepariwisataan yang dikemukakan oleh Gunn, faktor-faktor eksternal dapat mempengaruhi kinerja sistem kepariwisataan.

Mengacu pada model sistem kepariwisataan tersebut, penulis mengembangan model sistem kepariwisataan yang menggabungkan komponen-komponen utama dari keempat system tersebut. Model di atas menjelaskan bahwa sistem kepariwisataan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu permintaan, sediaan, dan perantara. Komponen permintaan dan sediaan sudah dijelaskan dengan rinci sebelumnya. Komponen perantara terdiri dari elemen-elemen yang menghubungkan antara permintaan dengan sediaan, yang mengantarkan pasar pariwisata untuk memenuhi keinginan/preferensi dan kebutuhannya terhadap sediaan pariwisata di destiuasi pariwisata yang ditujunya. Seperti juga yang dijelaskan oleh Gunn dan Turgut (2002) dan Mathieson dan Wall (1982) bahwa kinerja sistem kepariwisataan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, antara lain kebijakan pemerintah, kondisi keuangan/ekonomi, kondisi alam dan budaya, masyarakat, kewirausahaan, dan kompetisi.

4. Perencanaan Pariwisata

Perencanaan adalah fasilitasi atau advokasi atau intervensi yang bertujuan untuk mengubah proses yang sudah ada. Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel (dalam Riyadi & Supriady; 2004:2) perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program dari beberapa alternative yang ada. Sementara menurut Rose 2002:6, disebutkan bahwa perencanaan merupakan suatu aktifitas yang multidimensional dan berusaha bersifat integrative. Ini mencakup faktor-faktor social, ekonomi, politik, psikologi, antropologi dan teknik dengan mempertimbangkan masa lalu, sekarang dan yang akan datang.

Sedangkan unsur-unsur perencanaan adalah meliputi: (1) Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. Dengan demikian berarti perencanaan yang disusun harus didasarkan pada asumsi-asumsi yang didukung oleh fakta atau bukti yang ada, karena perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan atau aktifitas. (2) Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Oleh karena itu dalam menyusun rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. (3) Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan merupakan suatu alat atau sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan. (4) Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi jika pada saat pelaksanaan rencana akan ada kemungkinan-kemungkinan atau hal-hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan. (5) Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

- c. Fasilitas wisata dan pelayanan lainnya, yang termasuk dalam kelompok ini adalah tour operator, restoran, rumah makan, toko handicraft, cendramata, bank, tempat penukaran uang, pusat informasi pariwisata, tempat potong rambut dan kecantikan, fasilitas dan pelayanan kesehatan, fasilitas keamanan publik dan pelayanan polisi, pemadam kebakaran dan imigrasi.
- d. Transportasi, sebagai akses ke ODTW (transportasi internasional) dan alat transportasi lokal atau internal yang menghubungkan antara negara asal wisatawan dengan negara tujuan wisata, daerah atau objek wisata satu dengan objek wisata atau daerah tujuan wisata lainnya.
- e. Infrastruktur lainnya, yaitu bentuk pelayanan publik lain yang dapat mendukung pengembangan pariwisata seperti, sarana jalan, bandar udara, pelabuhan laut, terminal bus, stasiun kereta api, suplai air bersih, sarana penerangan, tempat penampungan sampah, telepon, drainase yang baik dsb.
- f. Elemen-elemen Institusi, elemen ini juga memegang peranan penting dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata yaitu program perencanaan, pendidikan dan pelatihan, strategi pemasaran dan program promosi, organisasi pariwisata baik pemerintah maupun swasta, peraturan yang menyangkut pariwisata, kebijakan investasi sektor pemerintah maupun swasta, program kontrol terhadap dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya.

Selain komponen-komponen utama di atas, faktor lain yang merupakan pendukung komponen tersebut adalah terdiri dari:

- a. Lingkungan alam dan sosial ekonomi, ini berhubungan dengan tempat dimana akan direncanakan sebagai objek wisata, resort dsb.

- b. Kelompok wisatawan domestik dan internasional, ini berhubungan dengan segmen pasar.
- c. Masyarakat lokal setempat, keterlibatan mereka dalam perencanaan pariwisata mulai dari tahap pra perencanaan, perencanaan dan operasional.

Ketiga aspek di atas, baru dapat dikelola dengan baik ketika terdapat perencanaan yang berbasis kompartitif, yakni memadukan ketiga komponen ini dalam lingkaran industry pariwisata. Tentu, pemerintah dapat melakukan ini melalui kewenangan otonomi yang telah dimiliki sebagaimana diatur dalam berbagai perundangan Negara yang secara tegas mengatur tugas dan fungsi serta kewenangan pemerintah daerah, diantaranya adalah UU No. 23 tahun 2014.

7. Prosedur Perencanaan Pariwisata

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan secara maksimal seperti yang diinginkan, maka perencanaan harus mengacu kepada proses-proses perencanaan yang dapat dijadikan sebagai prosedur pedoman dalam membuat perencanaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlu adanya Persiapan studi, pada tahap ini perlu menyiapkan perumusan TOR (*term of reference*) dan penetapan tim perencanaan di sesuaikan dengan keahlian yang dimiliki oleh setiap individu yang dilibatkan. Misalnya, ahli ekonomi, pemasaran, pariwisata, sosiologi, antropologi dll.
- b. Perlu Penetapan Objektivitas, menentukan tujuan pendahuluan untuk menjadi guideline dalam pencapaian tujuan ke depan yang diinginkan, sehingga dalam

pelaksanaan program rencana tidak keluar dari koridor tujuan yang sudah ditetapkan.

- c. **Survei.** Survei dilakukan untuk mengumpulkan data baik kualitatif maupun kuantitatif yang berhubungan dengan lokasi, lingkungan alam (iklim topografi, lingkungan alam; iklim topografi, kehidupan liar dan vegetasi, area pantai dan bahari, geologi, ekologi, sistem ekologi, area sumberdaya alam), Sejarah yang berpengaruh, pola sosiokultural dan ekonomi, pola landuse, permukiman, dan kepemilikan tanah, serta survei terhadap elemen-elemen institusi yaitu menyangkut kebijakan pengembangan, perencanaan yang sudah ada, regulasi, struktur organisasi pemerintah dan kepariwisataan, kebijakan investasi, program pendidikan dan pelatihan.
- d. **Analisis dan Sintesis** dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan bentuk data yang diperoleh pada saat survei. Analisis dilakukan terhadap:
- (1) Proyeksi belanja wisatawan (analisis dampak ekonomi).
 - (2) Analisis pasar & proyeksi wisatawan.
 - (3) **Proyeksi akomodasi dan fasilitas lain dibutuhkan** (proyeksi kebutuhan SDM).
 - (4) Proyeksi kebutuhan transportasi dan infrastruktur lain.
 - (5) **Analisis terpadu dan evaluasi kondisi fisik, sosial, & ekonomi; objek dan daya tarik; daya dukung.**
 - (6) Identifikasi kesempatan dan masalah pengembangan pariwisata.
 - (7) Kualitas dan dampak lingkungan oleh pariwisata.
 - (8) Masalah dan manfaat sosial budaya oleh pariwisata.

- (9) Kesiapan kebijakan finansial dan ketersediaan modal.
 - (10) Efektifitas struktur organisasi pariwisata.
 - (11) Efektifitas atau kelengkapan peraturan dan perundangan pariwisata.
- e. Formulasi Kebijakan, (pendekatan pembangunan untuk mengarahkan dalam menetapkan pengambilan keputusan) dan rencana (struktur bagian-bagian dalam satu sistem menyeluruh), yang meliputi:
- (1) Kebijakan ekonomi.
 - (2) Strategi pemasaran.
 - (3) Pengembangan SDM.
 - (4) Persiapan dan evaluasi alternatif pengembangan kebijakan & struktur rencana, berdasar analisis sosial, ekonomi, dan dampak lingkungan, serta efektifitas.
 - (5) Umpan balik ke objektif dan proyeksi, dan modifikasi kebijakan dan rencana.
 - (6) Kebijakan pengembangan/ konservasi lingkungan.
 - (7) Kebijakan pengembangan sosial budaya.
 - (8) Kebijakan pengembangan investasi.
 - (9) Kebijakan pengembangan organisasi.
 - (10) Kebijakan pengembangan peraturan dan perundangan
- f. Rekomendasi, meliputi;
- (1) Peningkatan & distribusi manfaat ekonomi.
 - (2) Program promosi pariwisata.
 - (3) Program pendidikan dan pelatihan.

- (4) Rencana terstruktur (pengembangan objek dan daya tarik, rencana pengembangan wilayah pariwisata, rencana rute perjalanan wisata, rancangan pengembangan)
- (5) Kontrol kualitas dan dampak lingkungan.
- (6) Ukuran-ukuran dampak sosial budaya & program konservasi.
- (7) Investasi, insentif, & sumber dana pengembangan proyek.
- (8) Persaratan struktur organisasi pemerintah dan swasta.
- (9) Pengembangan baru atau modifikasi struktur peraturan dan perundang-undangan

g. Implementasi dan monitoring. Tahap ini dilakukan sebagai tahap terakhir dalam proses perencanaan pariwisata. Tahapan yang dilakukan dalam implementasi dan monitoring ini adalah:

- (1) mengkaji ulang rencana
- (2) penerapan rencana
- (3) penerapan peraturan dan perundangan
- (4) pengintegrasian dengan pembangunan sektor pemerintah dan swasta
- (5) penyesuaian rencana program seperti yang dibutuhkan
- (6) kaji ulang dan revisi periodik.

8. Teori Tentang Keunggulan Kompetitif.

Teori keunggulan Kompetitif (*Competitif Advantage*) atau dikenal dengan keunggulan bersaing ialah kemampuan yang diperoleh sebuah perusahaan melalui karakteristik dan sumberdaya yang dimiliki untuk dapat memiliki kerja lebih tinggi disbanding dengan perusahaan lain yang ada pada perusahaan yang

sama. Teori ini cetuskan oleh Michael Porter dalam sebuah bukunya yang berjudul *Competitive Advantage* (1985) merupakan salah satu tenaga pengajar di sekolah bisnis Universitas Harvard. Pada tahun 1985 beliau mengemukakan bahwa “Keunggulan Kompetitif adalah jantung dari kinerja perusahaan dalam pasar yang kompetitif... Keunggulan Kompetitif adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan benar-benar menempatkan strategi-strategi generic kedalam praktek”. Pendapat ini semakin dikuatkan oleh pendapat Day dan Wensley (1988), Keunggulan Kompetitif yang berkelanjutan merupakan salah satu bentuk dari strategi bagi para aktor ekonomi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Lebih lanjut dijelaskan oleh Ferdinand, bahwa pada pasar yang kompetitif, kemampuan aktor menghasilkan kinerja, terutama kinerja dalam sektor keuangan sangat bergantung pada derajat kompetitifnya. Intinya bahwa Keunggulan kompetitif merupakan strategi yang tepat untuk mencapai kinerja yang unggul dan hasil yang maksimal. (dikutip dari Dosen Ekonomi.com)

Teori ini bila dikaitkan dengan Perencanaan kepariwisataan, maka sudah barang tentu merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam rangka pengembangan-pengembangan ODTW yang bisa bersaing pada levelnya. Ada 5 strategi yang perlu diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah dalam meunculkan Perencanaan yang berbasis keunggulan kompetitif:

1. Ancaman pendatang baru
2. Kekuatan Tawar menawar
3. Ancaman Produk pengganti/substitusi

4. Kekuatan tawar menawar pembeli
5. Persaingan kompetitif diantara anggota industry.

Teori keunggulan kompetitif ini akan disejalankan dengan perencanaan yang akan dibahas pada kajian Penelitian ini dan tidak dibahas secara detail. Karena penulis lebih menitik beratkan pada Langkah-langkah perencanaan.

B. Kajian Terdahulu

Telah banyak kajian mengenai pariwisata dan system perencanaan daerah. Tidak semua kajian-kajian itu dapat penulis hadirkan dalam tesis ini dan hanya beberapa saja diantaranya yang dimaksudkan sebagai pembanding dan sebagai penguat karena penelitian yang penulis lakukan ini bukanlah penelitian pertama. Namun, penelitian penulis ini juga berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya; terutama dengan tiga penelitian sebagai berikut:

1. Noor Nailie Assat, 2018: Penelitian di Jepara.

Assat dalam tesis berjudul “Analisis Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Karimunjawa Yang Berkelanjutan (Sustainability tourism) di Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara” dari Universitas Islam Indonesia tahun 2018. Melalui tesisnya ini, Assat melihat faktor pendapatan baik negara maupun pendapatan daerah dari keberadaan objek wisata Karimunjawa belum signifikan. Dalam proposisinya, Assat menyatakan bahwa pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang optimal semestinya mampu memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi.

Hal ini membutuhkan perencanaan yang tepat terutama di lingkungan pengambil keputusan dan kebijakan. Salah satu daerah yang sedang mengembangkan kawasan pariwisata adalah Kabupaten Jepara terutama di Kecamatan Karimunjawa. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara disebutkan bahwa visi pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2025 adalah “Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada industri pertanian dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdaya saing tinggi”. Penelitian yang bertujuan untuk menentukan prioritas dari perencanaan pembangunan kawasan pariwisata di Kecamatan Karimunjawa, dari urutan prioritas tersebut kemudian dibuat strategi perencanaan pengembangan pariwisata dengan menggunakan metode analisa ekonomi, metode analytical network process (ANP) untuk pemilihan alternative perencanaan dan pemberian bobot kriteria dari masing-masing alternative perencanaan pembangunan. Terakhir adalah metode swot untuk mengembangkan strategi perencanaan pembangunan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tinggi di Kabupaten Jepara tidak diiringi oleh pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk dari sector pariwisata. Penduduk tetap bergantung pada pertanian, perkebunan dan perikanan dan sector pariwisata ini belum berdampak pada pendapatan per-kapita penduduk.

Hasil yang didapatkan dari penelitiannya bahwasanya prioritas perencanaan pengembangan kawasan pariwisata di Kecamatan Karimunjawa adalah perencanaan pengembangan infrastruktur, perencanaan pengembangan investasi, perencanaan industri pariwisata, dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Dari masing-masing prioritas tersebut dibuat strategi perencanaan

pengembangan kawasan pariwisata dengan prioritas perbaikan jalan dengan skala prioritas untuk ruas jalan Pulau Kemojan - Mrican, jalan Pulau Parang dan Pulau Nyamuk, pengembangan transportasi baik darat, laut dan udara serta pengembangan dermaga pelabuhan pembantu yang ada di Kecamatan Karimunjawa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis diantaranya, Pertama pada kondisi geografis Natuna yang tidak berada dalam satu daratan sehingga membutuhkan prioritas yang setara diantara pusat-pusat pengembangan wisata yang ada dan tidak seperti di wilayah penelitian Azzat yang berada pada satu hamparan darat. Kedua, cakupan wilayah penelitian ini adalah kabupaten sehingga lokusnya bisa pada 11 objek daya tarik wisata sehingga penelitian ini, selain lebih luas juga lebih bersifat kebijakan umum. Ketiga terkait dengan penggunaan metode, dimana Azzat lebih berorientasi pada arsitektur dan ekonomis; sementara riset peneliti lebih pada komitmen pemerintah dalam membuat kebijakan melalui perencanaan yang dapat diimplementasikan oleh semua pihak, tidak saja pengelolaan kawasan destinasi wisata tetapi juga dalam membuat kebijakan umum untuk mengurangi biaya perjalanan yang sangat mahal untuk datang ke dan dari Natuna.

2. Razeki Harry Wijaya, 2009; Penelitian di Kabupaten Langkat

Penelitian Wijaya ini berjudul “Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Tangkahan dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat” dengan tujuan riset adalah untuk mengetahui pengembangan kawasan wisata Tangkahan serta kontribusi upaya pada pengembangan kawasan wisata Tangkahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat. Penelitian ini juga berupaya untuk menganalisis upaya pengembangan atas objek

objek dan daya tarik wisata, sarana wisata, prasarana wisata, masyarakat di sekitar objek wisata. Upaya pengembangan kawasan wisata Tangkahan dianalisis berdasarkan data sekunder yaitu studi dokumentasi yang dikeluarkan oleh *World Tourism Organisation* (dokumen mengenai wisata), *Indonesia Ecotourism Network* dan Yayasan Leuser Indonesia (data dan dokumen mengenai kawasan wisata Tangkahan), Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Pemerintahan Kabupaten Langkat (data mengenai pengembangan ekowisata).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian penjelasan (*explanatory research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, sedangkan jenis penelitian adalah penelitian survei.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi wisatawan terhadap objek dan daya tarik wisata di Tangkahan memperoleh nilai saldo bersih sebesar (88,23%). Persepsi masyarakat di Tangkahan terhadap objek dan daya tarik wisata memperoleh nilai saldo bersih sebesar (58,66%). Data ini menunjukkan persepsi para wisatawan dan masyarakat sekitar terhadap objek dan daya tarik wisata Tangkahan adalah optimis. Persepsi wisatawan terhadap sarana wisata di Tangkahan nilai saldo bersihnya sebesar (-27,76%). Persepsi masyarakat di sekitar Tangkahan nilai saldo bersihnya sebesar (-40,90%). Hal ini menunjukkan persepsi wisatawan dan masyarakat sekitar terhadap sarana wisata di Tangkahan adalah pesimis. Persepsi wisatawan terhadap prasarana wisata di Tangkahan nilai saldo

bersihnya sebesar (-79,73%). Persepsi masyarakat di sekitar terhadap prasarana wisata di Tangkahan nilai saldo bersihnya sebesar (-59,46%). Hal ini menunjukkan persepsi wisatawan dan masyarakat sekitar terhadap prasarana wisata di Tangkahan adalah pesimis. Persepsi wisatawan terhadap masyarakat di sekitar objek wisata di Tangkahan nilai saldo bersihnya sebesar (77,12%). Persepsi masyarakat terhadap masyarakat di sekitar objek wisata di Tangkahan nilai saldo bersihnya sebesar (42,47%). Hal ini menunjukkan persepsi wisatawan dan masyarakat sekitar terhadap masyarakat di sekitar objek wisata Tangkahan adalah optimis. Kawasan wisata di Tangkahan memiliki potensi keindahan alam yang layak dikembangkan, namun potensi yang dimiliki saat ini belum menjadi keunggulan yang dapat memberikan kontribusi pada perekonomian Kabupaten Langkat sehingga belum memberikan sumbangan yang berarti kepada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.

Beda penelitian ini tidak saja dari tujuan, tetapi juga pada jenis. Penelitian penulis tidak sampai mengukur derajat pengaruh tetapi hanya pada melihat konten yang penting dapat diakomodir oleh pemerintah melalui perencanaan partisipatif. Dengan penelitian ini, peneliti tidak saja menghasilkan konsep bertindak (perencanaan) bagi pemerintah tetapi secara umum dapat menjadi alur bertindak yang dipecah menurut actor dan lokasi. Perbedaan kedua adalah pada objek, dimana objek riset peneliti mencakup kawasan destinasi di kabupaten sehingga membutuhkan keadilan pemerintah dalam melakukan tata kelola destinasi, sekaligus menghasilkan konsep dan model pengelolaan destinasi.

3. Muhammad Syafi'i, 2015. Penelitian di Kabupaten Demak

Penelitian Syafi'i ini berjudul "Perencanaan Desa Wisata Dengan Pendekatan Konsep Community Based Tourism (CBT) Di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak" yang terbit dalam Jurnal Ruang Volume 1 No. 2, 2015, 51-60; dengan lokus di Desa Bedono, yakni sebuah desa di wilayah pesisir kabupaten Demak yang memiliki potensi wisata mangrove dan wisata religi. Peneliti mengambil objek komunitas mangrove bahari dan komunitas nelayan Morosari yang sangat potensial dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Konsep tentang CBT merupakan konsep pengembangan desa wisata dengan melibatkan dan menempatkan masyarakat lokal yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sendiri untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan keberlanjutan kebudayaan lokal dan sumber daya alam.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategi pengembangan dan pengelolaan desa wisata di kawasan pesisir Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dengan pendekatan konsep CBT. Pada penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan dibagi dalam tiga kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian kemudian dijadikan sebagai masukan untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata di Desa Bedono yaitu sebuah strategi pengembangan dan pengelolaan desa wisata Bedono yang berasal dari potensi masalah yang ada di desa Bedono dan didukung oleh kebijakan serta organisasi yang ada.

Penelitian ini beranjak dari kondisi umum terkait kondisi pemukiman nelayan dimana sekitar 80% dari penduduk pesisir dinegara-negara sedang berkembang berada dalam kondisi kehidupan yang miskin dengan kualitas lingkungan pesisir yang terdegradasi. Dalam perkembangannya, wilayah pesisir bukan lagi hanya berupa permukiman nelayan yang kumuh, namun saat ini dapat dikembangkan sebagai tempat wisata yang menarik dengan penanganan khusus agar wilayah pesisir dapat berkembang secara berkelanjutan (*sustainable development*). Salah satu upaya kearah ini adalah menciptakan terciptanya desa wisata pesisir. Melalui desa wisata dengan dilibatkannya masyarakat sebagai pengelola bukan hanya bertujuan untuk hanya memberdayakan masyarakat desa tetapi dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat dengan menjadikan desa sebagai tujuan wisata namun demi menjaga kelestarian ekosistem mangrove yang ada dan juga pelestarian nilai-nilai budaya religi yang berlaku dimasyarakat. Kondisi seperti ini juga terjadi di wilayah penelitian penulis sehingga dapat menjadi model yang mendukung penciptaan desa wisata pada kawasan pesisir yang memang menjadi keunggulan kompetitif kawasan riset penulis. Beda dengan riset ini sangat tipis, hanya berbeda cakupan saja, yakni mencakup kabupaten.

C. Kerangka Penelitian

Berangkat dari 4 (empat) fenomena masalah yang terjadi di Kabupaten Natuna, peneliti merumuskan masalah ini menjadi “belum terakomodirnya unsur-unsur pembentuk kekuatan daerah dalam perencanaan kepariwisataan di Kabupaten Natuna sehingga potensi wisata maritim tidak dapat berkembang secara akumulatif dan proporsional bagi mendongkrak kedatangan turis ke Natuna”.

Dari rumusan masalah di atas, terlihat bahwa perencanaan pariwisata yang dilakukan di Kabupaten Natuna selain belum memenuhi unsur-unsur esensi juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, riset ini akan mengeksplorasi dari para pihak apakah unsure penting sebagaimana dimaksud oleh berbagai ahli sebagaimana tersebut dalam falsafah kepariwisataan, system kepariwisataan dan system pariwisata.

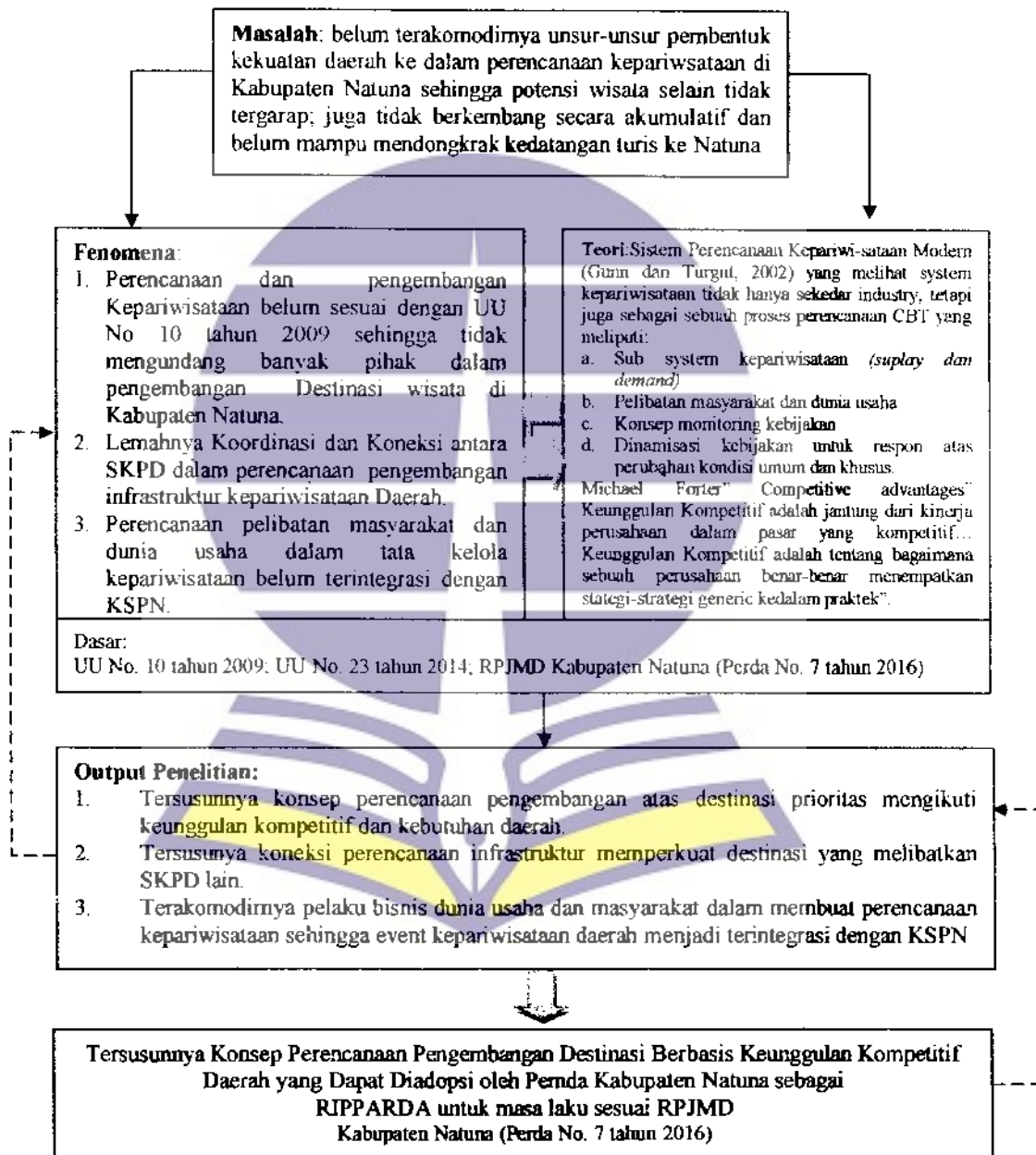
Secara kebijakan, Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah melihat kondisi, masalah, peluang dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah. Guna perwujudan dari UU Kepariwisata itu, lahirlah program pemerintah yaitu "*Wonderful Indonesia*". Program ini lahir sebagai upaya pembentukan citra pariwisata Indonesia ke mata dunia. Program yang dijalankan sejak tahun 2011 ini berperan sangat positif bagi sektor pariwisata Indonesia, namun masih menghadapi 4 permasalahan utama yang penulis sampaikan di atas. Juga, tidak semua daerah mampu menarik peluang dalam menarik keuntungan dari keberadaan program tersebut, meskipun pemerintah telah menerapkan KSPN. Salah satunya adalah tidak dimilikinya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang sering disingkat RIPPDA yang merupakan rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.

Kegiatan kepariwisataan yang cakupannya sangat luas serta seringkali 'sensitif' bukanlah kegiatan yang tidak dapat dirumuskan. Ia merupakan kegiatan yang

bersifat sistematis dan memiliki ruang lingkup, komponen dan proses tersendiri. Dapat dikatakan ia merupakan system perdagangan berobjek jasa dan yang bukan berupa jasa, serta mendapat dukungan dari system lainnya seperti sosial budaya, lingkungan hidup, religi dan lainnya. Kegiatan kepariwisataan berorientasi pada penyediaan jasa pariwisata, dan bisnis pariwisata meliputi seluruh kegiatan penyediaan jasa yang dibutuhkan wisatawan meliputi jasa perjalanan (*travel*) dan transportasi, penginapan, jasa boga, rekreasi serta jasa lain yang terkait seperti penukaran uang, jasa hiburan, jasa informasi dan sejenisnya (Simatupang; 2009). Penelitian ini mencoba untuk menelisik isi perencanaan yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna, apakah konten kebijakan itu telah memenuhi harapan masyarakat; terutama masyarakat, pelaku usaha kepariwisataan dan pelaku kebijakan itu sendiri serta turis yang secara insidental dijumpai di lokasi penelitian. Output yang diharapkan dari riset ini adalah tersusunnya konsep perencanaan kepariwisataan yang mengakomodir kesemua konten kepariwisataan dan mempertimbangkan aspek kepentingan daerah dalam konteks KSPN dengan mengikuti model teori Model Lengkap Sistem Kepariwisataann Gunn. Secara lengkap digambarkan pada gambar 2.9 yaitu Kerangka Pemikiran Penelitian berikutnyasebagai berikut :

Gambar 2.5

Alur Pikir Penelitian Perencanaan Pariwisata Berbasis Keunggulan Kompetitif Daerah



Sumber: Peneliti, 2018; disempurnakan tahun 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah tentang perencanaan kebijakan terkait perencanaan pembangunan objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Natuna. Penelitian lebih bersifat deskriptik analitik sehingga dapat dikelompokkan ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif analitik menurut Azwar (1998:7) bertujuan untuk tidak hanya menggambarkan, tetapi juga menganalisis secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik tertentu dengan cara menggambarkan situasi atau kejadian yang nyata di lapangan.

Lebih lanjut menurut Nawawi (1995) metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian yang dapat berupa seseorang, lembaga, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Berdasarkan pendapat di atas, dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan fenomena dan permasalahan yang terjadi berkenaan dengan proses perencanaan kebijakan yang diharapkan akan menghasilkan konten perencanaan yang tidak saja memenuhi unsur komparatif atau keunggulan daerah tetapi juga mengakomodir harapan dan keinginan para pihak sehingga perencanaan dari hasil studi ini dapat menjadi bagian dari perencanaan komprehensif. Ketika pemerintah daerah hendak mengakomodir hasil riset ini, dapat dilakukan dengan

mudah sehingga dapat dimasukkan menjadi sebuah perencanaan daerah yang telah mengakomodir semua kepentingan dan harapan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis akan mencari data dan informasi berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana permasalahan atau fenomena sosial yang diteliti itu terjadi. Mengingat luasnya cakupan wilayah penelitian, dimana hampir seluruh wilayah di Kabupaten Natuna, maka sudah barang tentu dilakukan pembatasan; yakni pada tiga objek objek prioritas destinasi di Kabupaten Natuna. Adapun pertimbangan penulis dalam memilih lokasi penelitian tersebut adalah:

1. Keunggulan destinasi wisata di Kabupaten Natuna ada pada pantai yang hingga kini belum mampu dioptimalkan sebagai destinasi unggulan. Diantara pantai yang ada dan menjadi destinasi prioritas adalah Pantai Jantai, Pantai Lubang Kamak, Pantai Janik, Pantai Semitan, Pulau Senua, Pantai Pasir Marus, Pulau Serasan, Tanjung Senubing, Air Terjun Gunung Hiu, Pulau Tiga, Pantai Batu Kasah, Pantai Tanjung, Alif Stone Park, Pantai Teluk Buton, Pantai Sahi. Hampir seluruh destinasi ini memiliki keunggulan kompetitif yang sama dan oleh karena itu akan dipilih satu destinasi sebagai objek yang mewakili pantai; yang dalam hal ini, dipilih Alif Stone Park karena memiliki kemiripan dengan pantai eropah yang persoalannya terkait dengan perencanaan pengembangan destinasi tidak melihat unsur komparatif ini.
2. Infrastruktur yang dibutuhkan bagi kenyamanan wisata belum dilakukan pemerintah daerah sehingga potensi itu tidak muncul dan diperlukan kajian

untuk mengerucutkan peran para pihak atas objek wisata yang berpotensi menjadi unggulan daerah. Kondisi destinasi seperti yang dimaksud ini adalah Pantai Tanjung yang hanya berjarak 10 Km dari Kota Rannai dan berada di jalur sutera dimana rakyat telah memulai melakukan penataan, namun belum dilakukan secara profesional.

Dari dua lokasi penelitian tersebut diharapkan akan diperoleh gambaran mengenai konsep mengkolaborasi kekuatan diantara para pihak untuk satu aksi, mewujudkan destinasi di Kepulauan Natuna ke dalam KSPN.

C. Subyek Penelitian

Setelah ditetapkan lokasi penelitian, berikutnya dipilih informan sebagai subyek penelitian. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi, yang biasanya berupa data serta keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah riset. Menurut Arikunto (2006) informan adalah orang-orang yang ditentukan atau dipilih untuk memberikan jawaban lisan melalui wawancara, sehingga dapat diperoleh informasi yang berkenaan dengan objek penelitian. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan tehnik *purposive*, yaitu suatu teknik penentuan sumber informasi untuk tujuan tertentu saja, artinya yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dengan jelas tentang permasalahan yang diangkat (Sugiono, 2000: 62). Dalam penelitian ini orang yang dipilih sebagai informan adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang kepariwisataan, mereka yang konsen dalam bidang kepariwisataan dari berbagai golongan mulai dari masyarakat, dunia usaha hingga pemerintahan.

Berangkat dari kriteria tersebut, penulis menetapkan informan penelitian sebagai berikut.

- a. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, terkait dengan arah kebijakan pembangunan pariwisata daerah.
- b. Kepala Desa yang wilayahnya ditetapkan sebagai lokasi penelitian; yang dalam hal ini adalah dua orang kepala desa. Dari informan Kades ini diharapkan diperoleh informasi mengenai harapannya kepada pemerintah dalam kontek mengembangkan keunggulan komparasi daerah dan dalam sinergi daerah dalam pengembangan destinasi dan pelayanan publik.
- c. Pimpinan Komisi II DPRD Kabupaten Natuna yang membidangi urusan Pembangunan. Dari informan ini diharapkan dapat diperoleh dukungan alokasi sumber daya dan dana bagi pembanngunan destinasi.
- d. Pelaku usaha pariwisata sebanyak 2 (dua) orang; yakni pelaku usaha yang sudah melakukan kegiatan usaha di destinasi. Dari informan ini diharapkan diperoleh tata kerja dan pola hubungan antara pengelola dengan masyarakat yang semestinya diakomir oleh pemerintah daerah melalui perencanaan dan pengembangan destinasi.
- e. Tokoh masyarakat di sekitar kawasan wisata terpilih sebanyak dua (2) orang untuk mewakili kelompok muda dan tokoh adat terkait dengan tata kerja dan pola hubungan antara pengelola dengan masyarakat yang semestinya diakomir oleh pemerintah daerah melalui perencanaan dan pengembangan destinasi.

D. Tehnik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. **Teknik observasi.** Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan dengan tujuan mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasi elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial yang serba kompleks dalam pola-pola kultural tertentu dalam melakukan observasi penulis turun langsung di lapangan guna melakukan pengamatan terhadap objek yang dapat diamati secara langsung, dengan menggunakan pedoman observasi.
2. **Teknik wawancara,** dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung (peneliti sebagai *interviewer*) dengan para informan yang sudah ditentukan oleh penulis sesuai dengan kapasitas informan dan informasi yang mereka miliki. Dalam wawancara tersebut tidak dilakukan secara ketat dalam arti penulis memberikan kesempatan kepada penulis untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan tanpa dibatasi. Dalam wawancara tersebut peneliti akan menanyakan secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan penataan destinasi.
3. **Teknik dokumentasi.** Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari informasi dari catatan atau dokumen yang ada dan yang dianggap relevan dengan masalah penelitian. Tehnik dokumentasi dilakukan menggunakan alat dokumentasi, dengan melihat dan meneliti berbagai

dokumen yang berhubungan dengan kepariwisataan daerah berikut data statistik pariwisata, Renstra Dinas Pariwisata, RPJMD dan sebagainya.

E. Alat Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pelaksanaan pada penelitian peneliti menggunakan alat bantu:

1. **Pedoman observasi**, merupakan pedoman atau kisis-kisi yang digunakan oleh penulis untuk mengisi data yang dilihat pada saat melakukan pengamatan langsung di lapangan guna memeriksa data atau informasi yang diperlukan.
2. **Pedoman wawancara**, merupakan acuan penulis pada saat melakukan wawancara dengan para informan, akan tetapi pedoman wawancara dalam penelitian ini sifatnya terbuka yaitu dapat berkembang saat dilakukan wawancara sesuai dengan kondisi dan situasi dilapangan, namun tetap mengacu pada topik penelitian. Pada wawancara terbuka yang “diwawancarai” mengetahui bahwa mereka sedang diwawancara dan mengetahui pula maksud wawancara itu sehingga data atau informasi yang diperoleh lebih mengutamakan persepsi informan.
3. **Alat dokumentasi**, yaitu catatan lapangan, dokumen-dokumen dan *foto copy*. Dokumentasi ini diperlukan untuk memudahkan peneliti memperoleh data sekunder.

F. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Sebagaimana

yang dikatakan Nasution (1996:142), analisa data pada penelitian kualitatif merupakan kegiatan kreatif karena tidak ada cara-cara terperinci dalam analisa data. Oleh sebab itu setiap penelitian harus mencari caranya sendiri dalam melakukan analisa. Sementara Singarimbun dan Effendi (dalam Rahim 2002:20) mengatakan bahwa analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

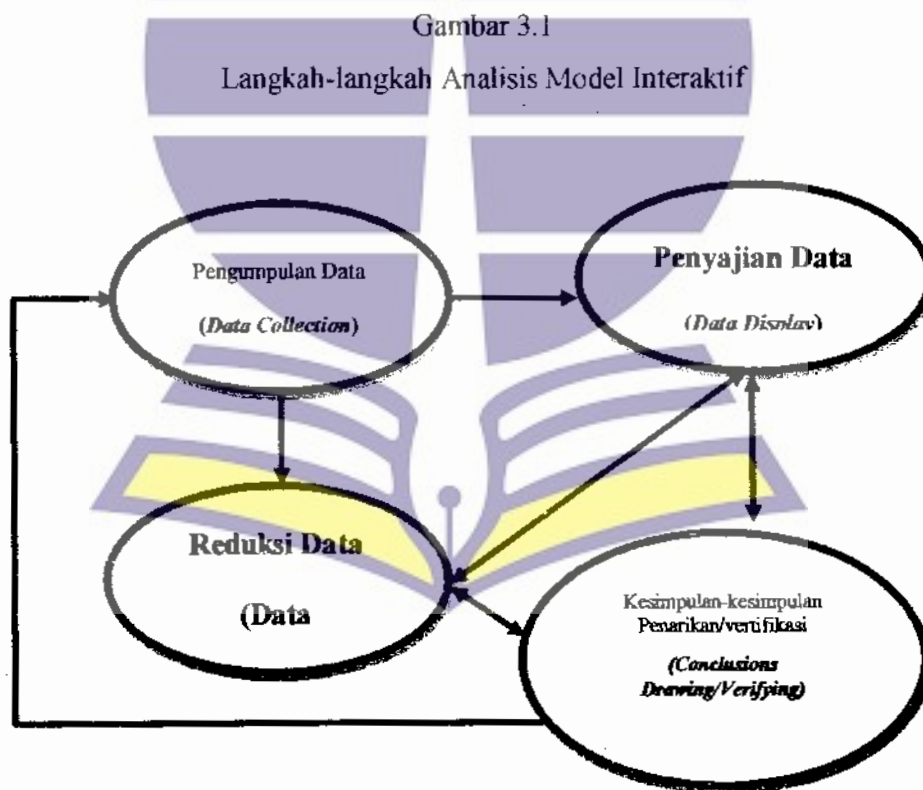
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, dimana data yang telah didapat dipahami secara lengkap baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kelompoknya kemudian dilakukan penganalisaan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan mendalam atas berbagai fokus penelitian. Dari pemahaman yang jelas dan mendalam tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis ini mengacu pada pandangan Miles dan Huberman (1992: 15-20) dengan prosedur: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data (Miles dan Huberman, 1992:16) dapat dipahami sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan di lapangan.

Reduksi data merupakan suatu analisis dengan menggolongkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat diperoleh dan diverifikasi. Penyajian data dimaksudkan sebagai bagian dari kegiatan analisis data yang berusaha menyusun data atau informasi baik dalam bentuk teks naratif, matrik,

tabel maupun bagan. Dengan penyajian data yang tepat diharapkan dapat diperoleh pemahaman informasi yang lengkap dengan jelas sehingga memungkinkan dapat memperoleh kesimpulan secara akurat.

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu bagian kegiatan analisis yang penting. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Pada tahap ini diperlukan kemampuan intelektual peneliti untuk berfikir kritis sehingga dapat menarik kesimpulan secara tepat dan kesimpulan yang diperoleh dapat diverifikasi kembali sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat dan objektif. Secara lengkap, langkah-langkah dimaksud diperlihatkan seperti gambar berikut:



Sumber: Miles dan Huberman (1992)
Sisi lain dari teknik analisis data, diungkapkan oleh Bungin (2010, 84-93)

menyebutkan terdapat lima macam model analisis. Kelima model itu adalah

1. Teknis Analisis Dominan (*Dominan Analysis*). Teknik ini penulis gunakan

untuk menganalisis gambaran obyek peneliti secara umum; namun masih di tingkat permukaan, tetapi relatif utuh tentang obyek penelitian. Teknis ini dilakukan peneliti agar diperoleh suatu gambaran obyek secara umum tentang data-data yang dapat menggambarkan fokus penelitian secara utuh.

2. Teknik Analisis Taksonomik (*Taxonomic Analysis*). Teknik ini penulis lakukan dengan cara pengelompokan data-data dari lapangan, setelah peneliti memahami dominan-dominan sesuai fokus masalah yang ada dalam tema penelitian. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah memilih salah satu dominan dari beberapa dominan untuk dianalisis, seperti melakukan wawancara untuk mengecek ulang data yang sudah dianalisis dan membuat taksonomik lebih lengkap. Hasil lengkap dari model analisis ini penulis tuangkan dalam Bab Analisis atau Bab 4.
3. Teknik Analisis Komponensial (*componential Analysis*). Teknik ini penulis lakukan melalui pendekatan kontras antar elemen, dimana peneliti menyusun data-data yang diperoleh dari lapangan dan mengelompokkan mereka serta memilih data-data yang kontras untuk menjadi unit analisis dan meninggalkan data yang tidak kontras dengan tema penelitian dengan tujuan untuk tidak membuat pertentangan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Model analisis ini dilakukan untuk menganalisis hasil penelitian atau dituangkan ke dalam Bab 4. Dengan demikian, pada Bab 4 dilakukan dua model analisis secara terus-menerus; yakni teknik komparasi dan teknik taksonomik.
4. Teknis Analisis Tema Kultural (*Discovering Cultural Themes Analysis*). Teknik analisis tema kultur ini, yakni peneliti beradaptasi dengan persoalan yang

sedang diteliti, mencari dan membuka peluang munculnya data-data baru atau informan baru dan sebagainya. Dalam teknik ini analisis yang dilakukan peneliti dengan cara memahami gejala-gejala atau fenomena yang terjadi dalam penelitian analisis sebelumnya. Teknik ini tidak digunakan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Komparatif Konstan, yakni teknik untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi di saat peneliti menganalisa kejadian tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada gambaran yang lebih rinci mengenai gejala-gejala, ciri-ciri data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan penulis untuk memunculkan permasalahan seperti dilakukan pada Bab.1.

Dengan demikian, di dalam penelitian ini, terdapat empat teknik yang digunakan untuk menganalisis temuan. Keempat teknik tersebut adalah teknik pertama, kedua dan ketiga serta kelima. Sementara teknik keempat tidak digunakan karena penelitian ini bukan bersifat penelitian tentang kultural.

G. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Pada dasarnya penerapan kriteria derajat kepercayaan menggantikan konsep validitas internal dari penelitian non kualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan *inquiry* (penyelidikan) sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dicapai, dan menunjukkan derajat kepercayaan terhadap hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Beberapa cara yang diupayakan oleh

peneliti agar kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya antara lain adalah dengan:

- 1) Memperpanjang masa observasi, sehingga peneliti mempunyai cukup waktu dalam mengenal lingkungan, mengadakan hubungan baik dengan orang-orang di lokasi penelitian, mengenal kebudayaan lingkungan di tempat penelitian dan mengecek kebenaran berbagai informasi yang diperoleh.
- 2) Pengamatan secara terus-menerus terhadap fenomena atau fokus penelitian dengan maksudkan agar memperoleh kedalaman, kecermatan dan ketelitian.
- 3) Triangulasi, yang ditempuh dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lainnya selama proses lapangan berlangsung. Terdapat tiga pola triangulasi, yakni perbandingan terhadap data, sumber data, dan teknik pengumpulan data (Gabrielian et al., 2008). Meskipun prosedur ini akan banyak memakan waktu, tetapi peneliti memandang prosedur ini sangat penting dengan harapan selain mempertinggi validitas, juga memberi kedalaman hasil penelitian. Sebagaimana disebutkan oleh Denzin dan Lincoln dan juga Patton (dalam Erdi, 2011) bahwa terdapat 4 (empat) jenis triangulasi, yakni triangulasi data, triangulasi investigator, triangulasi teori dan triangulasi metodologis. Dalam penelitian ini, digunakan tiga macam triangulasi, yakni (1) triangulasi data, yakni penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian yang diwujudkan dengan mewawancarai berbagai informan dari berbagai posisi dan status yang tentunya akan berbeda titik pandang; (2) triangulasi teori, yakni

penggunaan sudut pandang ganda dalam menafsirkan seperangkat data; dan (3) triangulasi metodologis, yakni penggunaan beberapa metode dan alat untuk mengkaji sehingga penelitian ini dilengkapi dengan pedoman wawancara, daftar pengamatan dan juga kajian terhadap dokumen yang relevan dengan masalah penelitian. Dengan demikian, teknik triangulasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa data, teori dan metode dilakukan secara benar dan mengikuti prosedural ilmiah agar analisis data dapat menghasilkan temuan ilmiah secara valid.

- 4) Membicarakan topik dan hasil temuan sementara dengan orang lain yang mempunyai pengetahuan dalam fokus penelitian. Pembicaraan ini autaralain bertujuan untuk memperoleh kritik, pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan menantang tingkat kepercayaan akan keberhasilan hasil penelitian.
- 5) Mengadakan pengecekan ulang pada setiap akhir wawancara atas berbagai hal yang telah disampaikan oleh informan dengan maksud agar informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan laporan penelitian sesuai dengan apa yang diinaksud oleh informan.

H. Derajat Keteralihan (*transferability*)

Derajat keteralihan merupakan validitas eksternal yang didasarkan pada konteks empiris *setting* penelitian, yaitu tentang *emic* yang diterima oleh peneliti dan *etic* yang merupakan hasil interpretasi peneliti. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, mendalam dan adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima.

1. Derajat Ketergantungan (*dependability*)

Derajat ketergantungan dilakukan untuk memeriksa akurasi pengumpulan dan analisis data. Agar derajat reliabilitas dapat tercapai, diperlukan audit atau pemeriksaan secara cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Oleh karena itu peneliti perlu menyediakan data mentah, data hasil analisis dan data hasil sintesis serta catatan mengenai proses yang digunakan.

2. Derajat Kepastian (*confirmability*)

Derajat kepastian yaitu objektivitas yang berdasarkan pada *emic* dan *etic* sebagai tradisi penelitian kualitatif. Derajat ini juga dapat dicapai melalui *audit* atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.

3. Penyajian Data (*Displaying the data*)

Data yang sudah teranalisis, disajikan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, gambar, grafik dan urutan peristiwa. Peneliti kemudian membuat narasi, baik secara partial maupun komprehensif dari kasus per kasus dengan berpedoman pada masalah dan tujuan penelitian. Persepsi penulis dituliskan dalam setiap bagian sebagai penyajian data dan ia menjadi hasil dari penelitian ini. Persepsi tersebut dibuat dalam bentuk deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi dengan narasi berdasarkan hasil wawancara, interaksi, observasi perilaku aktor dan rekaman peristiwa yang diperoleh selama penelitian lapangan berlangsung dan diolah sepanjang proses penelitian ini.